

ANALISIS BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*

(STUDI KASUS BUMDESMA MANDIRI SEJAHTERA PATI)

Nabilla Apriliany Cantik Prameswari
Email : nabillaapriliany32@gmail.com

Dr. Dra. Kushandajani, M.S
Email : ningkisworo123@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Website :
<https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai analisis Badan Usaha Milik Desa Bersama Mandiri Sejahtera Pati dalam perspektif *good governance*. Hal ini mengingat di Kabupaten Pati sebenarnya masing-masing desa sudah memiliki BUMDes masing-masing, tetapi pada pelaksanaannya mayoritas masih terkendala kredit macet. Muncul terobosan baru dengan menyatukan beberapa desa dalam sebuah BUMDesma. BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati digadag-gadag menjadi terobosan terbaru badan usaha desa yang berjalan di bidang kesehatan. Permasalahan yang diteliti muncul untuk melihat bagaimana BUMDesma ini mengelola organisasinya tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati dalam perspektif *good governance*. Proses menganalisisnya, penelitian ini menggunakan teori *Good Governance* dari Dr. Sedarmayanti dengan variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaannya BUMDesma ini masih belum berjalan dengan baik. Namun, tak dipungkiri terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi terutama dalam hal akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang sejauh ini masih menjadi kritik dari para pengurus. Selain itu, masih kurangnya koordinasi antar stakeholders yang menyebabkan salah komunikasi antara satu sama lain.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati berdasarkan teori *Good Governance* yang penulis gunakan yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi secara keseluruhan BUMDesma masih kurang. Kekurangan dari BUMDesma ini seperti kurangnya koordinasi antar anggota, ketidakjelasan laporan keuangan, RUPS, dan masalah bagi hasil. Saran bagi BUMDesma adalah untuk lebih memfokuskan pada evaluasi pelaporan

keuangan dan meningkatkan koordinasi antar anggota untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman informasi. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya supaya bisa melihat dari sudut pandang lain dan bagi daerah lain bahwa penelitian ini bisa menjadi referensi dalam pembentukan BUMDesma.

Kata kunci : *good governance*, akuntabilitas, transparansi, partisipas

ANALYSIS OF JOINT VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES IN GOOD GOVERNANCE PERSPECTIVE

(Case Study of BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati)

Nabilla Apriliany Cantik Prameswari
Email : nabillaapriliany32@gmail.com

Dr. Dra. Kushandajani, M.S
Email : ningkisworo123@gmail.com

Department of Politic and Government
Faculty of Social and Political Science Diponegoro University Website :
<https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the analysis of the Village-Owned Enterprises Together with Mandiri Sejahtera Pati in the perspective of good governance. This is because in Pati Regency, in fact, each village already has its own BUMDes, but in practice the majority are still constrained by bad loans. A new breakthrough emerged by uniting several villages into a BUMDesma. BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati is predicted to be the latest breakthrough for village business entities operating in the health sector. The problems studied arise to see how this BUMDesma manages its organization.

The purpose of this study was to analyze the governance of BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati in the perspective of good governance. The process of analyzing it, this study uses the theory of Good Governance from Dr. Sedarmayanti with the variables of Accountability, Transparency, and Participation. This study uses a qualitative descriptive method using data collection techniques carried out through the process of interviews, observation, and documentation.

The results of the study indicate that the management of BUMDesma is still not running well. However, it is undeniable that there are several problems and obstacles faced, especially in terms of accountability, namely accountability and financial reporting, which so far are still being criticized by the management. In addition, there is still a lack of coordination between stakeholders which causes miscommunication between each other.

Based on the results of the study, there is a conclusion that BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati based on the Good Governance theory that the author uses, namely Accountability, Transparency, and Participation, overall BUMDesma is still lacking. The disadvantages of BUMDesma are the lack of coordination between members, unclear financial reports, GMS, and profit sharing problems. Suggestions for BUMDesma are to focus more on evaluating financial reporting

and improving coordination between members to minimize information misunderstandings. Recommendations for further research so that they can see from other perspectives and for other areas that this research can be a reference in the formation of BUMDesma.

Keywords : good governance, accountability, transparency, participation

A. PENDAHULUAN

Permasalahan sosial dan tantangan bagi masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia yang sampai saat ini masih dicari solusinya adalah kemiskinan. Menurut Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) yang bekerja sama dengan Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), pada bulan September 2018, sebanyak 1.3 miliar masyarakat dunia terdeteksi sebagai masyarakat miskin.

Pada tingkat nasional, negara Indonesia mengalami tingkat kemiskinan paling tinggi pada tahun 1999 dengan persentase sebanyak 23,43%. Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat masyarakat miskin di negara ini mencapai 25,95 juta orang dengan persentase sebesar 9,82% pada tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi desa tak jarang dipandang lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi perkotaan (Anggraeni, 2016). Selama ini, kemiskinan di pedesaan juga dipandang lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan potensi asli desa.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pati dan Sekitarnya, 2019

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	P0	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pati	119,00	9,46	1,47	0,31	423 922
Grobogan	161,90	11,77	1,53	0,13	375 521
Blora	97,90	11,32	0,90	0,34	335 837
Rembang	95,30	14,95	2,32	0,48	384 561
Kudus	58,00	6,68	0,83	0,17	406 470
Jepara	83,50	6,66	0,64	0,10	386 693
Jawa Tengah	3 743,23	10,80	1,53	0,30	369 385

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati

Pada kawasan Kabupaten Pati dan sekitarnya dengan jumlah penduduk miskin terbanyak ialah Kabupaten Grobogan sebesar 161, 90 ribu jiwa yang setelah itu disusul oleh Kabupaten Pati di posisi kedua dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 119,00 ribu jiwa. Padahal Kabupaten Pati memiliki potensi-potensi yang bisa ditingkatkan seperti contohnya sumber daya alam di daerah tersebut. Selain itu, Kabupaten Pati juga memiliki 401 desa yang mana lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Grobogan yang hanya memiliki 273 desa. Potensi-potensi yang ada di desa-desa di wilayah Kabupaten Pati seharusnya bisa dikembangkan sehingga dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten Pati dan nantinya dapat menjadikan Kabupaten Pati berada di posisi terbawah dalam hal banyaknya kemiskinan di wilayah sekitarnya tersebut.

BUMDesma merupakan suatu Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh lebih dari satu desa dan dilakukan secara bersama-sama. Pembentukan BUMDesma dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes. Pendirian, penggabungan,

peleburan, dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015).

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diisinyalir dapat menjadi titik pertama dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi pedesaan dan menjalankan serta mengembangkan unit usaha desa dikarenakan perekonomian pedesaan merupakan poros utama untuk menciptakan pembangunan pedesaan yang maju. Pendirian BUMDes diyakini bisa memacu gerak roda perekonomian yang ada di desa serta bisa mewujudkan perekonomian yang merata dengan terbentuknya unit-unit usaha di desa (Alkadafi, 2014).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pati telah ada sejak tahun 2014, akan tetapi jumlahnya masih sangat sedikit. Kemudian, semakin lama jumlah tersebut makin bertambah dan mulai tahun 2019. Pada kenyataannya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Pati hanya mendirikan unit usaha simpan pinjam padahal dalam pelaksanaannya usaha ini seringkali terbengkalai terutama dibelit oleh kredit macet. Kemudian, muncul gagasan untuk membuat usaha dengan melihat potensi desa secara lebih kreatif yakni dengan mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

Pada awalnya, gagasan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) ditujukan bagi seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Pati akan tetapi tidak semua desa berminat untuk bergabung dan hanya ada 159 desa yang sepakat untuk membentuk BUMDesma dari jumlah total 401 desa yang ada di Kabupaten Pati. Selanjutnya, setiap desa menyumbangkan dana yang digunakan sebagai modal awal pendirian.

Tujuan didirikannya BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati adalah sebagai penggerak tumbuhnya usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan Pati yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya, pemanfaatan dan pengoptimalan kekayaan desa guna kesejahteraan desa, pengembangan usaha-usaha masyarakat pedesaan dalam mengelola potensi yang ada di desa, peningkatan perencanaan kerjasama usaha yang ada di desa dengan pihak ketiga, upaya mewujudkan kesempatan dan relasi pasar yang memotivasi kebutuhan pelayanan masyarakat pedesaan, pengembangan kualitas pelayanan dasar pedesaan, pewujudan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan serta pendapatan asli desa sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Mandiri Sejahtera Pati.

Dalam upaya pengelolaannya, BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati membentuk sebuah

Perusahaan Terbatas (PT). Hal ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam hal menjalin kerja sama dengan pihak ketiga karena telah berbadan hukum dan juga memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga terbentuklah PT. Maju Berdikari Sejahtera Pati (PT. MBSP). PT. MBSP inilah yang nantinya melahirkan unit usaha Klinik BUMDes Sehat, BUMDes Co-Working Space, dan PT. Mitra Desa Pati (PT MDP).

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati dalam perspektif *good governance*.

C. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1. *Good Governance* dalam Tata Kelola BUMDes

Menurut Sedarmayanti (2010:67) pengertian *good governance* adalah sistem yang memberikan peluang terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga hubungan yang membangun antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, *good governance* merupakan semuanya yang berkaitan dengan tindakan ataupun tingkah laku yang sifatnya mengendalikan, mengarahkan, maupun mempengaruhi persoalan publik guna menciptakan nilai-nilai itu pada kehidupan sehari-hari (Dr. Sedarmayanti, 2003).

World Bank dalam Mardiasmo (2004:23) mendefinisikan *governance* sebagai “*the way*

state power is used in managing economic and social resources for development of society” yang berarti cara kekuasaan negara dipergunakan dalam mengelola ekonomi dan sumber daya sosial untuk pembangunan masyarakat.

Good governance dianggap menjadi alternatif pelaksanaan pemerintahan potensi masing-masing *stakeholders* bisa direalisasikan dalam menanggulangi persoalan dan hambatan yang ada di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga dapat berkembangnya kegiatan yang berfokus pada pengembangan kesejahteraan masyarakat, demokrasi, dan kemandirian daerah. Adapun, setidaknya ada beberapa prinsip yang dinilai sebagai prinsip-prinsip utama yang mendasari *good governance*, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2009:289).

a. Akuntabilitas

Pemerintah sudah semestinya mampu mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemerintah juga harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan. Prinsip akuntabilitas juga berhubungan dengan tanggungjawab terhadap keefektifan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan target dari kebijakan

dan program.

b. **Transparansi**

Prinsip transparansi dapat diartikan ketika masyarakat dan sesama pegawai pemerintah sama-sama mrngetahui dan mendapatkan data dan informasi secara mudah dan akurat mengenai kebijakan, program, maupun kegiatan dari pemerintah di tingkat pusat atau daerah selama data dan informasi tersebut tak melanggar peraturan perundang- undangan yang telah dimufakati. Data dan informasi ysng berhubungan drngan tugas dan fungsi dari pemerintah (organisasi yang berkaitan dipaparkan dengan sebenar- benarnya. Selain itu, juga menghendaki terbukanya peluang bagi masyarakat untuk mengemukakan kritik dan saran terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.

c. **Partisipasi**

Tiap-tiap kebijakan yang ada di pemerintahan haruslah dilandasi dengan kesepakatan bersama masyarakat. Terdapat kritik dan saran oleh masyarakat untuk menciptakan kinerja pelayanan yang semakin baik. Selain itu, juga melibatkan masyarakat untuk bersosialisasi.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif tipe deskriptif. Metode deskriptif kualitatif dapat digunakan sebagai pendekatan bagi penelitian ini, yaitu untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dalam perspektif *good governance*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi, wawancara secara langsung dan dokumentasi.

E. HASIL PENELITIAN

Analisis BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati dalam Perspektif *Good Governance*

1. Akuntabilitas BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati

Selama masa keberjalanan BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati sejauh ini organisasi tersebut mempunyai program tahunan yaitu yang beroperasi pada bidang kesehatan. Sampai dengan saat ini telah berjalan 5 Klinik Bumdes Sehat Sehat yang berlokasi di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pati yakni Kcamatan Pati, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Margoyoso.

Hal tersebut tentu saja tidak membuat BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati hanya diam di tempat. BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati mempunyai upaya-upaya pengembangan berikutnya agar organisasi ini dapat terus berkembang. Adapun, upaya pengembangan akan lebih berfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan seperti penambahan fasilitas dokter gigi, laboratorium di Klinik Bumdes Sehat dan

layanan Home Care Klinik Bumdes Sehat yang mana sebelumnya belum ada fasilitas-fasilitas tersebut.

Program tahunan lainnya yang dilaksanakan adalah membuat laporan mengenai hasil kegiatan yang BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati laksanakan. Salah satunya ialah Rapat Umum Pemegang Saham atau seringkali disebut RUPS. RUPS telah diselenggarakan pada tahun 2020 kemarin. Pada proses penyelenggaraan RUPS ini disesuaikan dengan aturan protokol kesehatan covid-19 yang ditetapkan pemerintah.

Aspek akuntabilitas dari BUMDesma ini dinilai masih kurang. Meskipun, dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program seperti pengembangan fasilitas dan layanan di Klinik Pratama Bumdes Sehat sudah cukup baik, akan tetapi karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan rapat dan evaluasi menjadi terhambat. Hal inilah yang dikeluhkan oleh para anggota BUMDesma karena masih kurang jelasnya laporan keuangan dan belum diadakannya RUPS.

2. Transparansi BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati

Prinsip transparansi dalam organisasi BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati sendiri meliputi beberapa aspek yaitu bagaimana akses masyarakat dan anggota terhadap informasi BUMDesma, apakah BUMDesma

Mandiri Sejahtera Pati menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan ada atau tidaknya proses sosialisasi yang diselenggarakan oleh BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati. Proses sosialisasi di sini adalah sosialisasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati.

BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati sudah menyediakan akses agar masyarakat dapat secara mudah memperoleh informasi mengenai program BUMDesma. Media sosial menjadi jalan untuk menyebarkan informasi tersebut, seperti melalui Facebook, Twitter, Website, dan Instagram. Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat pernah dilakukan sebelum pandemi covid-19 dengan cara mendatangi langsung desa-desa yang berada di sekitar Klinik Pratama Bumdes Sehat. Namun, yang menjadi kekurangan di aspek transparansi BUMDesma adalah masih kurangnya keterbukaan mengenai bagaimana laporan keuangan yang ada. Hal ini yang menuai kritik di kalangan anggota.

3. Partisipasi BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati

Prinsip partisipasi ini yang juga dilaksanakan oleh BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati. Pada tiap-tiap Klinik Pratama Bumdes Sehat telah disediakan kotak khusus sebagai wadah untuk menulis kritik dan saran bagi masyarakat yang datang berkunjung. Kritik dan saran ini yang selanjutnya akan

digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati. Proses evaluasi tersebut dilaksanakan bukan tanpa alasan. Berawal dari kritik dan saran masyarakat dapat dijadikan acuan proses evaluasi BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati. Hal yang demikian bertujuan supaya dalam keberjalannya BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati menjadi lebih baik ke depannya.

Partisipasi di BUMDesma dilakukan dengan cara menyediakan wadah untuk masyarakat mengutarakan kritik dan saran yaitu dengan diberikan box khusus yang ada di tiap-tiap Klinik Pratama Bumdes Sehat. Sedangkan, untuk para anggota BUMDesma sendiri dibentuk sebuah Grup Whatsapp sehingga menjadi wadah untuk para anggota mengemukakan pendapat via online. Kritik dan saran dari masyarakat mayoritas berkaitan dengan pelayanan Klinik Pratama Bumdes Sehat, seperti jam pelayanan dokter yang tidak selalu tersedia setiap saat padahal ada masyarakat yang datang untuk periksa. Hal tersebut masih bisa teratasi dengan baik. Namun, yang menjadi permasalahan adalah masih kurangnya koordinasi antar anggota sehingga menyebabkan missed communication dalam menjalankan BUMDesma ini. Kembali lagi, kritik dan saran yang masuk di kalangan para anggota adalah berkuat pada laporan keuangan, progress, dan pelaksanaan RUPS. Kurangnya koordinasi dari anggota-anggota

BUMDesma salah satunya disebabkan karena para anggota memiliki pekerjaan dan kesibukan masing-masing di luar keanggotaannya di BUMDesma sehingga tidak bisa terfokus pada keberjalanan BUMDesma ini saja.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan teori *Good Governance* yang penulis gunakan yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi secara keseluruhan BUMDesma masih kurang. Kekurangan dari BUMDesma ini seperti kurangnya koordinasi antar anggota, ketidakjelasan laporan keuangan, RUPS, dan masalah bagi hasil. Namun, di balik kekurangannya tersebut BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati dapat dijadikan acuan bagi kabupaten lain agar termotivasi dengan program-program yang dilaksanakan oleh BUMDesma ini.

BUMDesma berusaha mengembangkan program yang sudah ada, seperti penambahan pelayanan Home Care di Klinik Pratama Bumdes Sehat. Selain itu, tidak ada pembatas dalam keanggotaan BUMDesma di mana antara generasi milenial dan generasi tua. Hal ini dapat mendorong minat generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam BUMDesma.

Meski diterpa beberapa permasalahan, BUMDesma ini masih tetap berjalan dengan memberi terobosan baru yang menjadi satu-satunya BUMDes yang bergerak di bidang kesehatan. Sedangkan, berbagai bentuk

kendala yang dihadapi dapat dijadikan pembelajaran untuk ke depannya.

Saran

Berdasarkan temuan yang ada, terdapat kelemahan yang ada. Oleh karena itu, penulis memberikan saran di antaranya untuk ke depannya BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati bisa menjadi lebih baik. Utamanya dalam hal pertanggungjawaban dan transparansi pelaporan keuangan, karena sejauh ini hal tersebut yang menuai kritik di kalangan para anggota BUMDesma.

Selain itu, peningkatan koordinasi antar stakeholders dalam BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati juga sangat diperlukan. Hal ini bertujuan supaya meminimalisir adanya *missed communication*. Adanya permasalahan-permasalahan dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar karena dengan adanya permasalahan ini maka diharapkan bisa dicari solusi yang terbaik dan menjadikan sebuah organisasi tersebut menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 2003)

Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012)

Jurnal

Alkadafi, Muammar. (2014). "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal El Riyasah*. Vol 5. No. 1, 32-40.

Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. (2016). "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta)". *MODUS*. Vol. 28. No.2, 155-16.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Sumber Lain

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati

Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama

(BUMDesma) Mandiri Sejahtera Pati